

Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Multiguna Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah Pada PT. BPD Sultra Cabang Utama

Titien Rahayuningsih¹, Vira Arianti Pratiwi², Asraf³, Rachmawati⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

titiarahayuningsih7@gmail.com¹, vira.arianti@gmail.com²,

asrafyusus23@gmail.com³, rachmawati@gmail.com⁴

Article Info

Article History

Received : March
12th, 2023

Revised : Mey 14th,
2023

Accepted : June 3rd,
2023

Published : Agustus
26nd, 2023

Copyright © 2023 by
the author



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit multiguna dalam mengurangi kredit bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yakni data yang dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sudah sangat memadai yaitu dengan diterapkannya 5 komponen pengendalian internal menurut COSO yang terdiri dari: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Aktivitas pemantauan.

Keyword: Sistem Pengendalian Internal, Kredit Multiguna, Kredit Bermasalah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perbankan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh industri yang terlibat dalam transaksi keuangan selalu

membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini sampai dengan masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik itu pribadi, sosial, ataupun perusahaan. Bank adalah perusahaan atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki lebih banyak dana dan pihak yang memiliki kurangnya. Depositor menanamkan uang mereka pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk simpanan bank lainnya, sedangkan debitur memberikan pinjaman kepada pihak yang memiliki kurangnya dana.

Menurut Kasmir (2012:112) dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat ditukar dengannya, tergantung pada pengaturan pinjaman atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang meminta peminjam untuk membayar kembali hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Anwar (2002:14), Kredit adalah ketika suatu pihak memberikan prestasi/jasa kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang, disertai dengan uang sebagai balas jasa. Pengendalian internal dalam arti luas meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen, Mulyadi (2013:163). COSO (*Committee Of Sponsoring Organization of The Threadway Commision*) Mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan utama yaitu, efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengelola kredit, peminjaman membutuhkan suatu sistem yang nantinya akan diterapkan. Nasabah dapat menggunakan sistem ini sebagai panduan saat mengajukan kredit dan saat melakukan pembayaran dengan cicilan. Sebelum memberikan kredit kepada nasabah, terlebih dahulu dilakukan analisis dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* agar menghindari kredit bermasalah dan juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit bermasalah merupakan kredit yang diberikan kepada individu dengan kolektibilitas diragukan, kurang lancar, dan macet. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh masalah lembaga keuangan eksternal dan internal, debitur yang meninggal dunia, perpindahan debitur, atau debitur diberhentikan atau dikeluarkan oleh dinas atau perusahaan merupakan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal yaitu berasal dari karyawan yang dimana dalam melakukan analisis, pihak analisis masih kurang teliti sehingga apa yang sudah terjadi tidak diperkirakan sebelumnya. Sistem pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah.

Pengendalian internal sangat diperlukan agar suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjadi perusahaan yang kuat dan independen, mereka harus mampu meningkatkan efisiensi pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi kemungkinan kegagalan kredit. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:23), Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi komitmennya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, atau kegagalan kredit yang disebabkan oleh sistem pengendalian intern yang buruk.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bank Sultra merupakan bank resmi yang berdiri sejak tanggal 2 maret 1968 berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta mendapat izin operasional dari menteri keuangan pada 27 januari 1970. Bank Sultra merupakan bank milik pemerintah yang telah meyalurkan berbagai jenis kredit sekaligus menjadi bank andalan dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang, salah satu jenis kredit yang disalurkan bank sultra yaitu kredit multiguna. Kredit multiguna merupakan kredit yang diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan konsumtif dengan jaminan SK kepegawaian.

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) sama-sama mendefinisikan kredit multiguna sebagai fasilitas kredit untuk semua penggunaan konsumtif dengan jaminan tanah dan bangunan tempat tinggal. Aminatus Sa'adah (2015) menyatakan bahwa Kredit Multiguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai/Calon Pegawai di Perusahaan Daerah dan Negeri, Anggota Polri, Anggota Legislatif, Pegawai Perusahaan Swasta, Pensiunan. Berdasarkan data kredit bermasalah yang peneliti peroleh dari PT. BPD Sultra peneliti mendapatkan laporan perkembangan analisis data kredit bermasalah multiguna, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 1. Laporan perkembangan analisis data kredit bermasala Multiguna di PT. BPD Sultra Cabang Utama Periode 2021-2022

| Tahun | Total Kredit Bermasalah | Total Kredit | Jumlah Debitur |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 2021 | Rp 9,024,156,686 | Rp 1,388,632,412,294 | 160 |
| 2022 | Rp 9,387,291,391 | Rp 1,394,399,742,293 | 161 |

Sumber: PT. BPD Sultra Cabang Utama

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 9.024.156.686 dengan jumlah debitur sebanyak 160 Orang

sedangkan pada tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 9.387.291.391 8209 dengan jumlah debitur sebanyak 161. Berdasarkan tabel diatas, bahwa naik turunnya kredit bermasalah terjadi karena misalnya nasabah melakukan indisipliner atau melanggar peraturan sehingga diberhentikan dari pekerjaannya, nasabah pindah instansi namun tidak melapor sehingga gajinya tidak terpotong dan nasabah pensiun dini, sehingga masalah tersebut menjadi penyebab kredit bermasalah di PT. BPD Sultra. Maka dari itu pihak perbankan pastinya membutuhkan pengawasan atau pengendalian internal yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan Novitasari (2017), yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit Multiguna Pada PT. Bank Sumut Cabang Utama”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sistem yang pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Utama dikatakan masih dikatakan kurang baik, hal tersebut dilihat dari lemahnya analisis kredit yang menyebabkan tingginya kredit macet dan tidak telitnya karyawan dalam menginput data nasabah kedalam aplikasi yang telah disediakan.

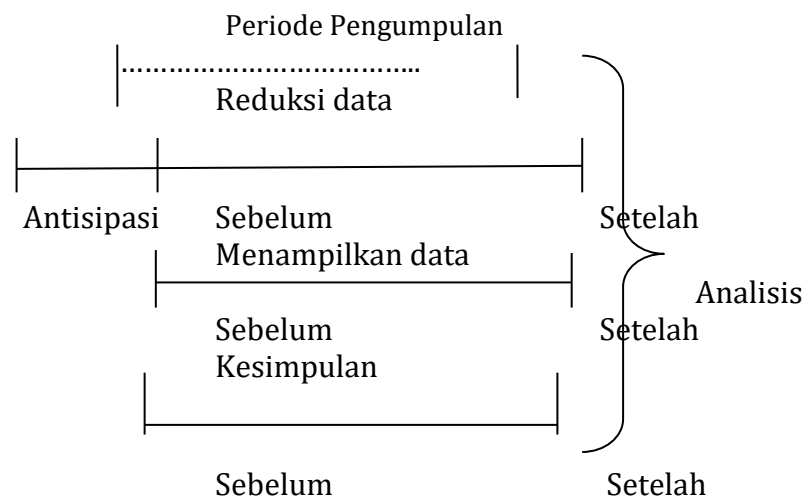
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nurzairah (2022), yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pemberian Kredit Multiguna pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar sudah berjalan efektif walaupun masih ada kendalanya dan masih banyak terjadi kredit macet, sistem yang dijalankan juga sudah sesuai dengan SOP sehingga meminimalisir risiko yang terjadi dan sistem pengendalian internal sesuai dengan komponen COSO dan sesuai dengan prinsip pemberian kredit 5C dan 7P. Pengendalian internal yang baik akan dapat meminimalkan kredit bermasalah. Pengendalian internal juga memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi dan didukung dengan karyawan yang berkualitas sehingga berjalan efektif dalam penyelesaian yang timbul akibat adanya kredit bermasalah. Semakin banyak kebutuhan terkait dengan kredit, pihak perbankan melakukan berbagai cara dalam mengurangi atau meminimalisir kredit bermasalah atas pemberian kredit tersebut

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu mencari data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik dan wawancara yang semuanya dapat mendukung proses hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah analisis dari hasil penelitian Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi/kesimpulan (Hasbi et al., 2021). Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan teori model Miles dan Huberman dengan mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Setelah semua data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul, peneliti menggunakan model analisis dengan alasan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut terus menerus sampai selesai. Peneliti menggunakan analisis tematik sebagai metode penelitian untuk memperoleh makna wawancara yang dapat memperkaya data kualitatif (Kasri et al., 2018).

Berikut ini adalah alur komponen dalam analisis data model Miles dan Huberman



Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau masih gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori (Nazwa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada PT. BPD Sultra Cabang Utama

Sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang disatukan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa keandalan dan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal, perusahaan harus menerapkan lima (5) komponen pengendalian internal agar dapat menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Komponen – komponen sistem pengendalian internal menurut *Commitee of*

Sponsoring Organizations (COSO) atas pemberian kredit berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka analisis data yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian meliputi sikap para manajemen dalam suatu perusahaan terhadap pentingnya penerapan pengendalian internal, pembentukan kedisiplinan dan struktur bagi perusahaan serta memberi kesadaran akan pentingnya pengendalian bagi suatu perusahaan. Lingkungan pengendalian pada PT. BPD Sultra dapat dilihat melalui analisis wawancara berikut ini:

a. Integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai-nilai etika mencakup tindakan perusahaan untuk menghilangkan atau meminimalisir suatu tindakan yang dapat mendorong karyawan untuk melakukan kecurangan dalam hal ini yaitu perilaku tidak jujur, illegal, atau tidak etis. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zakariah dalam wawancara yang mengungkapkan bahwa:

“Penerapan integritas dan nilai etika pada PT. BPD Sultra Cabang Utama telah dilakukan, yaitu dimana perusahaan menerapkan budaya kerja bank sultra. Budaya kerja tersebut biasa dikenal dengan TIPSS, yaitu terdiri dari : pertama Trust yang artinya membangun hubungan berdasarkan saling percaya dan keterbukaan dengan stakeholder dan mampu menjaga kerahasiaan bank, kedua Integrity yaitu bersikap jujur, bertanggungjawab, adil dan bijaksana, yang ketiga Professional yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi, disiplin, inovatif dan kreatif untuk mencapai kinerja yang optimal, kemudian yang keempat Synergy yaitu membangun hubungan kemitraan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan bisnis, dan yang terakhir Service Excellence yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan.” (Wawancara, 19 juni 2023)

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu entitas menggambarkan jalur tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami struktur organisasi entitas, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional bisnis serta penafsiran terkait bagaimana pengendalian internal diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zakariah dalam wawancara yang mengungkapkan bahwa:

“Penerapan struktur organisasi pada PT.BPD Sultra Cabang Utama telah dilakukan, yaitu dimana pembagian tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam menjalankan masing-masing tugas sesuai posisi atau jabatan yang sudah diamanahkan berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam struktur organisasi perusahaan khususnya pada bagian perkreditan, yang dimana terdiri dari Kepala divisi perkreditan, Kepala bagian pemasaran kredit,

Kepala bagian monitoring kredit, Kepala bagian penyelamatan kredit, dan Kepala Bagian Suportting kredit.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

c. Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi merupakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan setiap tugas pegawai. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen dalam tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana kompetensi tersebut diterjemahkan kedalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Zakariah dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

“Penerapan komitmen terhadap kompetensi pada PT.BPD Sultra Cabang Utama telah dilakukan, yaitu dengan mengetahui keahlian yang dimiliki karyawan dan menempatkan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas dan pengetahuan sdm yang dimiliki, bank sultra sering memberikan pelatihan kepada pegawai melalui daring (dalam jaringan) ataupun luring (luar jaringan). Dan juga bank sultra mengikutsertakan pegawai pada ujian sertifikasi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan kualitas sdm dengan ilmu/kompetensi dalam bidang teknis perbankan, non teknis, dan dibidang kepemimpinan.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

d. Dukungan penuh perusahaan

Penerapan pengendalian internal dimaksudkan untuk membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem pengendalian internal yang efektif harus dapat mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, meningkatkan kepercayaan bisnis, mendorong kepatuhan terhadap peraturan, dan mengurangi risiko kerugian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bapak Zakariah mengungkapkan bahwa:

“Penerapan dukungan penuh perusahaan terhadap tercapainya tujuan pengendalian internal organisasi pada PT. BPD Sultra Cabang Utama telah dilakukan, dari sisi pekerjaan yakni dimana perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap fasilitas-fasilitas karyawan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan perusahaan salah satunya yaitu fasilitas kendaraan.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada PT. BPD Sultra Cabang Utama dalam penerapan lingkungan pengendalian sudah memadai dimana perusahaan telah menerapkan integritas dan nilai etika, struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi pegawai, dan dukungan penuh perusahaan pada sistem pengendalian internalnya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessmet*)

Penilaian risiko adalah aktivitas yang dilakukan oleh entitas untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat manajemen dalam mencapai tujuannya. Risiko dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap penilaian risiko yang ada pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sebagai berikut.

a. Tindakan dalam mengidentifikasi risiko

Perusahaan harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang kemungkinan dapat terjadi dalam perusahaan guna tercapainya tujuan pengendalian internal perusahaan. Organisasi harus mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan dalam entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut diminimalisir dan dikelola. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Zakariah mengungkapkan bahwa.

“Penerapan tindakan manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan analisisnya dalam pemberian kredit sesuai prosedur yang berlaku telah dilakukan, dengan mengacu pada prinsip 5C yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan keuangan), Capital (Kondisi asset dan kekayaan), Collateral (Jaminan), dan Condition (Kondisi).Yang dimana sebelum memberikan kredit kepada calon debitur pastinya pertama kita harus melihat karakter atau kepribadian calon debitur apakah debitur memiliki reputasi yang baik atau tidak dalam lingkungan kerjanya, prinsip kedua capacity debitur yang dimana kita harus melihat kemampuan debitur dalam membayar utang, ketiga dilihat dari capital debitur atau kondisi gaji yang dimiliki debitur, keempat dilihat dari collateral atau jaminan debitur yang dimana agunan berupa shm, kemudian condition ini dilihat dari kondisi ekonomi debitur dan apakah debitur juga memiliki usaha yang dimiliki.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

b. Syarat – syarat yang harus dipenuhi

Pemberian kredit dalam aktivitasnya meliputi syarat – syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam prosedur pemberian kredit. Syarat–syarat tersebut dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dimasa mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zakariah selaku kepala bagian pemasaran kredit PT. BPD Sultra Cabang Utama dalam wawancara mengungkapkan bahwa :

“Penerapan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam melakukan pemberian kredit multiguna agar dapat mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadi kredit bermasalah telah dilakukan yaitu selain mengacu pada prinsip 5C perusahaan pastinya memiliki syarat – syarat umum sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, yang dimana calon debitur harus memiliki dokumen pendukung seperti KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu

keluarga), permohonan kredit, daftar gaji, SK kepegawaian, kemudian wajib memiliki rekening simpanan pada PT, BPD Sultra dan yang terpenting bagi calon nasabah yaitu gaji lancar dan masih aktif bekerja.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah usaha – usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan apapun ternyata tidak dapat dilakukan lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zakariah dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Penerapan PT. BPD Sultra dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah pastinya kita lakukan, yaitu dengan melakukan penagihan kepada nasabah dan memberikan surat peringatan, jika sudah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali maka berlaku denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran dan jika ada agunan/jaminan nasabah maka agunan/jaminan tersebut akan diambil oleh perusahaan.” (Wawancara, 19 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada PT. BPD Sultra Cabang Utama dalam penerapan resiko sudah sangat memadai, dimana perusahaan telah melakukan tindakan dalam mengidentifikasi risiko pemberian kredit multiguna sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan perusahaan juga memiliki syarat – syarat dalam pemberian kredit sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, serta melakukan tindakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap aktivitas pengendalian yang ada pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sebagai berikut:

a. Standar Operasional Perusahaan

Standar Operasional Perusahaan (SOP) merupakan panduan yang digunakan perusahaan guna memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Adanya SOP memudahkan pegawai perusahaan dalam menjalankan tugasnya dengan baik, mematuhi aturan yang berlaku dalam perusahaan guna menjaga tercapainya tujuan perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zakariah dalam wawancara mengungkapkan bahwa.

“Ya, PT. BPD Sultra Pasti memiliki standar operasional perusahaan (SOP) yang dimana penerapan SOP misalnya dalam operasional bank terdapat admin kredit yang melakukan proses administrasi perkreditan, yang berupa pemeriksaan dan verifikasi dokumen pinjaman dari calon debitur. Selain itu juga penerapan SOP ini juga telah dilakukan dan dijadikan pedoman dalam mengatur dan membantu pegawai pada perusahaan sehingga dalam menjalankan kewajibannya dilakukan dengan baik.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

b. Sistem atau proses pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit dalam dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing – masing bank. Dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak Zakariah bahwa.

“Sistem atau proses yang dilakukan dalam pemberian kredit multiguna yaitu dengan melakukan prosedur antara lain : Langkah pertama calon debitur melakukan permohonan/pengajuan kredit dengan melengkapi dokumen sesuai dengan syarat – syarat yang diperlukan, setelah melengkapi semua dokumen dilakukan verifikasi kebenaran dokumen untuk diperiksa dengan teliti kelengkapan dan kebenaran dokumen setelah diperiksa akan diputuskan apakah kredit diterima atau tidak, jika diterima maka dibuatkan dokumen penandatanganan perjanjian kredit kemudian setelah dilakukan penandatanganan maka dilakukan realisasi/pencairan kredit, kemudian jika ditolak maka dibuatkan surat penolakan dari bank kepada debitur.” (Wawancara, 19 Juni 2023).

c. Aktivitas Pemisahan Tugas

Pengendalian internal yang baik mengharuskan bahwa tidak ada seorang karyawan yang diberi terlalu banyak tugas dan tanggung jawab. Karyawan tidak boleh melakukan dan menyembunyikan kecurangan dan kesalahan. Pemisahan tugas yang efektif mensyaratkan fungsi-fungsi seperti otorisasi, fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan untuk dipisahkan. Seperti dalam teori tersebut, Bapak Zakariah dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“PT. BPD Sultra dalam melakukan pemberian kredit multiguna tentunya melakukan pemisahan tugas. Misalnya SO (Sales Officer) bertugas melayani nasabah dalam menerima berkas awal dan mengusulkan ke Kepala Seksi yang dimana bertugas memeriksa berkas – berkas nasabah dan ditanda tangani kemudian admin bertugas membuat perjanjian kredit dan Kepala Bagian Pemasaran Kredit juga bertugas memeriksa kembali berkas- berkas nasabah

apakah sudah valid kemudian diserahkan lagi ke Kepala Cabang yang bertugas dalam pengambilan keputusan untuk pencairan kredit.” (Wawancara, 19 Juni 2023).

d. Audit Internal secara berkala

Audit internal adalah suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan dan petunjuk yang bersifat tidak terikat dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan operasional perusahaan, melalui pendekatan yang terperinci, dengan cara menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Zakariah mengatakan bahwa:

“Penerapan audit internal secara berkala pada PT. BPD Sultra Cabang utama telah dilakukan yaitu dimana audit dilakukan persemester dan semua berkas- berkas yang telah dicairkan diperiksa kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan SOP.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aktivitas pengendalian pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sudah memadai, dimana perusahaan sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Perusahaan), sistem/prosedur pemberian kredit, aktivitas pemisahan tugas, dan juga melaksanakan audit internal secara berkala.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi diperlukan untuk pengambilan keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Komunikasi juga harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan akurat dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian internal dengan benar. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap informasi dan komunikasi pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sebagai berikut. Perusahaan memperoleh atau menghasilkan serta menggunakan informasi yang berkualitas dan akurat untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bapak Zakariah mengatakan bahwa.

“Bank dalam operasionalnya khususnya dalam membagi informasi/memberikan informasi kepada karyawan, bank tidak melakukan hal itu karena dalam pemberian kredit tidak semua karyawan harus mengetahui informasi terkait nasabah misalnya alasan penolakan kredit hal itu dilakukan untuk melindungi privasi nasabah.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam mendukung fungsi pengendalian internal. Berdasarkan hal tersebut sehubungan dengan komunikasi yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen. Bapak Zakariah dalam wawancara mengungkapkan bahwa.

“Komunikasi yang dilakukan harus baik dan komunikatif agar informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan transaksi yang terjadi. Kemudian dalam hal pemberian kredit multiguna, bank memiliki cara dalam memberikan informasi kepada calon nasabah seperti memberikan dan menyampaikan aturan - aturan dan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa penerapan informasi dan komunikasi pada PT. BPD Sultra Cabang Utama cukup memadai dimana informasi telah diterapkan guna mendukung fungsi pengendalian internal dalam melakukan operasionalnya serta memudahkan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkelanjutan oleh perusahaan untuk menentukan bahwa pengendalian sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis atas aktivitas pengendalian pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sebagai berikut. Pemantauan dalam pengendalian internal diaplikasikan pada kegiatan yang memang membutuhkan pengawasan karena rawan terhadap terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Dalam melakukan pemantauan, Bapak Zakariah dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Dalam melakukan pengawasan pengendalian internal terkait dengan pemberian kredit multiguna untuk meminimalisir atau mengurangi kredit bermasalah yaitu sebelum kredit dicairkan maka kita lakukan kembali pemeriksaan kelengkapan dokumen debitur yang telah dipersyaratkan, setelah dokumen dinyatakan layak dan memenuhi syarat serta dapat dipertanggungjawabkan maka akan disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang dan kepala seksi pemasaran kredit.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Pelaporan hasil pemantauan dilakukan untuk mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan operasional perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Zakariah mengungkapkan bahwa.

“Pelaporan hasil dari pemantauan yang dijalankan audit untuk menanggulangi kekurangan – kekurangan dalam pengendalian internal, maka akan dilakukan penilaian ulang dan dilakukan perbaikan – perbaikan pada sistem yang tidak berjalan pada internal perusahaan.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Hasil pemantauan dalam perusahaan dapat dinilai apabila perusahaan sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam perusahaan secara efektif dan efisien dan sebagai langkah untuk pengambilan keputusan terhadap manajer perusahaan apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Zakariah dalam wawancaranya mengatakan bahwa.

“Hasil pemantauan/monitoring yaitu dari masalah yang dilaporkan dilakukan analisis masalah dan pencarian jalan keluar ataupun solusi dalam hal pencapaian target perusahaan dan pengambilan keputusan dimasa mendatang. Sistem yang dianggap baik akan terus dijalankan oleh perusahaan dan sistem yang dianggap bersifat merugikan akan dihentikan.” (Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan aktivitas pemantauan pada PT. BPD Sultra Cabang Utama sudah memadai dimana perusahaan telah melakukan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, melaporkan hasil dari pemantauan/monitoring dan menilai hasil perusahaan berjalan efektif sesuai dengan pengendalian internal perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada PT. BPD Sultra Cabang Utama telah dilakukan sudah memadai dengan diterapkannya 5(lima) komponen pengendalian internal menurut teori COSO yang terdiri dari: Lingkungan Pengendalian telah diterapkan integritas dan nilai etika, struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi, serta dukungan penuh perusahaan. Penilaian Risiko telah diterapkan tindakan dalam mengidentifikasi risiko, menerapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi nasabah, dan penyelesaian kredit bermasalah. Aktivitas Pengendalian, telah diterapkan SOP (Standar Operasional Perusahaan), sistem atau prosedur dalam pemberian kredit, aktivitas pemisahaan tugas, dan menerapkan audit internal secara berkala. Informasi dan Komunikasi, telah diterapkan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pegawai dan calon debitur untuk mendukung fungsi atau tujuan pengendalian internal. Aktivitas Pemantauan, telah diterapkan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal, melaporkan hasil dari pemantauan dan menilai hasil perusahaan berjalan efektif sesuai dengan pengendalian internal perusahaan.

REFERENCES

Abdul Halim, 2015. *Effect of Competence and Auditor Independence on Audit Quality with Audit Time Budget and Professional Commitment as a Moderation Variabel,*

International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319
– 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X

- Abdullah, T. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Abdullah, T., & Sintha, W. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aldridge, John. E, & Siswanto Sutojo. (2008). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, & Amir Abadi Jusuf. (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aminatus Sa'adah, A. (2015). *Analisis sistem pemberian kredit multiguna dalam upaya meningkatkan pengendalian kredit pada PT. Bank Jatim*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Arifin , & Anwar. (2002). *Praktek Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Baridwan, & Zaki. (2010). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prodesur dan Metode*. Yogyakarta.
- Boy Leon, & Sonny Ericson. (2007). *Manajemen aktiva pasiva bank non devisa*. Jakarta: Grasindo.
- COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework Retrieved From*. Retrieved from [http://www.coso.org/..](http://www.coso.org/)
- Fibrianty, Yinni, V., Wijaya, & Ikke, O. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit. *Universitas Islam Lamongan*.
- Haryanti. (2019). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. Bank Kartadhani Mulya Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, 131-144.
- Hasibuan, M. S. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hery. (2013). *Auditing*. Jakarta: CAPS.
- Ikatan, B. I. (2016). *Strategi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada: Edisi Revisi.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada: Cetakan ke-14 .
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi* . Yogyakarta: Edisi ketiga.
- Kurniasih, R. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Moleong, & L. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* . Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi,Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muthmainna Husain, & Wa Ode Siti Nur Insani. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Kredit atas Pemberian Kredit dalam Mengurangi Kredit Macet. *Journal of Economic and Business*, 64-72.
- Novitasari. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit Multiguna pada PT. BANK SUMUT Cabang Utama Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Nurzairah. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Pemberian Kredit Multiguna pada PT Bank SULSELBAR Cabang Makassar. *Universitas Bosowa Makassar*.
- Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : FEBI UIN-US Press.
- Rivai, Veithzal, & Veithzal, A. P. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sukrisno, & Agoes. (2012). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, Cetakan Pertama*. Bandung: Penerbitan Lingga Jaya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
www.banksultra.co.id